

Analisis Kinerja Keuangan Daerah dan Tingkat Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah

Andriyani

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Corresponding Author Andriyani, E-Mail: Yaniaz39@gmail.com

Published: Februari, 2026

ABSTRACT

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah memiliki kapasitas fiskal yang memadai guna menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan daerah dan mengukur tingkat kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah periode tahun anggaran 2020–2024. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan memanfaatkan data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Analisis dilakukan melalui pengukuran rasio kemandirian, rasio ketergantungan, rasio desentralisasi fiskal, rasio efektivitas, rasio efisiensi, analisis *share and growth*, pemetaan kemampuan keuangan daerah, serta penghitungan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK). Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian fiskal daerah masih relatif rendah yang tercermin dari kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah yang belum optimal. Tingkat ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat masih tinggi, sehingga kapasitas fiskal daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri masih terbatas. Meskipun demikian, rasio efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah menunjukkan kinerja yang cukup baik. Berdasarkan analisis kemampuan keuangan daerah, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada tingkat kemampuan keuangan yang masih rendah dengan potensi peningkatan kapasitas fiskal. Temuan penelitian ini menegaskan pentingnya optimalisasi PAD serta penguatan pengelolaan keuangan daerah sebagai strategi peningkatan kemandirian fiskal dalam mendukung keberlanjutan otonomi daerah.

Keywords: Kinerja Keuangan Daerah, Kapasitas Fiskal Daerah, Otonomi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, Indeks Kemampuan Keuangan

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0>

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaannya, peran pemerintah daerah sangat menentukan keberhasilan dalam mewujudkan kemandirian daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dalam penyelenggaraan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta mengoptimalkan potensi daerah guna meningkatkan akuntabilitas ekonomi (Alkadrie, 2023). Keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kapasitas keuangan daerah, khususnya dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta penerimaan dan transfer seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Keterbatasan kemampuan keuangan dapat menghambat pelaksanaan fungsi pemerintahan secara mandiri dan efektif, sehingga diperlukan evaluasi terhadap perkembangan kemampuan keuangan daerah (Nabilah Denisa & Dito Aditia Darma Nasution, 2025).

Anggaran merupakan instrumen utama dalam pengelolaan keuangan pemerintah karena berfungsi sebagai dasar alokasi sumber daya publik yang harus dikelola secara efektif dan efisien. Pengelolaan tersebut tercermin dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi indikator kinerja dan kemampuan keuangan daerah. Dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dituntut untuk meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi potensi sumber pendapatan daerah, khususnya PAD (Aminuddin, 2024).



Gambar 1. Grafik Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024

Sumber : data yang diolah oleh penulis, 2026

Berdasarkan data Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 terlihat adanya tren peningkatan yang konsisten setiap tahunnya. Pada tahun 2020 PAD sebesar sekitar 49,6 miliar rupiah kemudian meningkat menjadi 52,9 miliar pada 2021. Kenaikan yang lebih signifikan terjadi pada 2022 dengan PAD mencapai sekitar 59,2 miliar rupiah dilanjutkan peningkatan pada 2023 menjadi 61,0 miliar rupiah dan kembali naik pada 2024 hingga sekitar 65,1 miliar rupiah. Secara keseluruhan, pertumbuhan PAD yang stabil mencerminkan semakin kuatnya kemandirian fiskal pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan dan pelayanan publik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Data yang digunakan data sekunder berupa data keuangan yang diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama lima tahun yakni dari tahun 2020 sampai dengan 2024. Teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui dokumentasi yaitu data yang dikumpulkan melalui dokumen laporan yang telah disediakan oleh pihak terkait. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

a. Rasio Kemandirian Daerah

$$\text{Rasio Kemandirian Keuangan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Ketergantungan Daerah

$$\text{Rasio Ketergantungan Daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatam Daerah}} \times 100\%$$

c. Rasio Desentralisasi Fiskal

$$\text{Rasio Desentralisasi Fiskal} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Efektivitas PAD

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

e. Rasio Efisiensi PAD

$$\text{Rasio Efisiensi PAD} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

2. Analisa Kemampuan Keuangan Daerah

a. Analisis *Share and Growth*

Analisis *share* digunakan untuk mengukur proporsi atau persentase pendapatan asli daerah dalam membiayai seluruh belanja daerah selama periode waktu tertentu, sehingga memberikan gambaran tentang kemampuan keuangan keuangan daerah dalam mengelola dan memenuhi kebutuhan belanja daerah.

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Pendapatan\ Daerah} \times 100\%$$

Analisis *growth* digunakan untuk mengukur kemampuan keuangan daerah yang menekankan kepada pertumbuhan pendapatan asli daerah (PAD) dari satu periode ke periode berikutnya serta memperkirakan prospek pertumbuhan ekonomi di masa yang akan datang.

$$Growth = \frac{PAD_t - PAD_{t-1}}{PAD_{t-1}} \times 100\%$$

b. Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Peta kemampuan keuangan daerah merupakan visualisasi yang menggambarkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokalnya. Pemetaan ini dilakukan dengan menggunakan metode kuadran yang didasarkan pada hasil perhitungan dari faktor *share and growth*. Melalui metode kuadran, pemerintah dapat mengidentifikasi suatu daerah dengan jelas mengenai kondisi kemampuan keuangan daerah dan potensi lokal yang dimiliki daerah tersebut.

c. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) salah satu indikator yang menggambarkan kemampuan keuangan suatu entitas, dalam mengelola sumber daya keuangan. IKK memiliki tiga komponen utama, yaitu Indeks Pertumbuhan (*Growth Index*), Indeks Elastisitas (*Elasticity Index*), dan Indeks Share (*Share Index*)

$$Indeks\ X = \frac{X - nilai\ minimum}{nilai\ maksimum - nilai\ minimum} \times 100\%$$

Selanjutnya Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) dirumuskan sebagai berikut:

$$IKK = \frac{XG + XE + XS}{3} \times 100\%$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Kinerja Keuangan

a. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

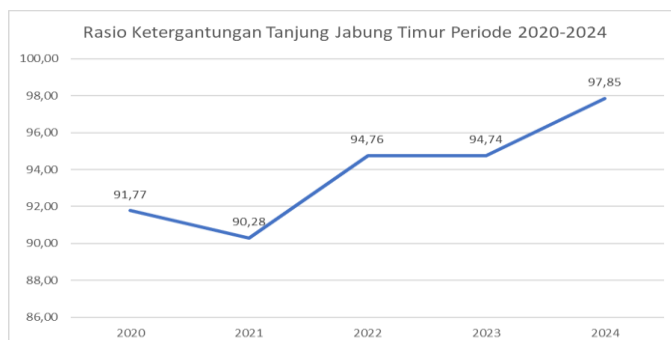


Gambar 2 : Grafik Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Berdasarkan grafik Rasio Kemandirian Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 terlihat bahwa rasio kemandirian mengalami fluktuasi. Pada tahun 2020 nilai rasio sebesar 4,72 kemudian meningkat pada tahun 2021 menjadi 7,02. Namun pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 5,24 dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 5,26. Selanjutnya

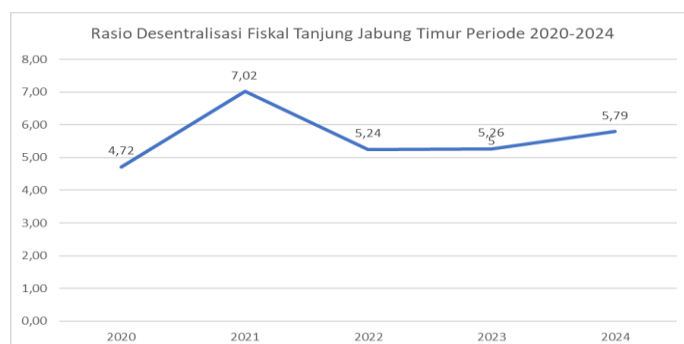
pada tahun 2024 rasio kembali meningkat menjadi 5,79. Secara umum, rasio kemandirian menunjukkan kecenderungan membaik di akhir periode penelitian.

b. Rasio Ketergantungan Daerah



Berdasarkan grafik rasio ketergantungan terlihat bahwa tingkat ketergantungan keuangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pemerintah pusat masih tergolong sangat tinggi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 rasio ketergantungan sebesar 91,77% kemudian menurun pada tahun 2021 menjadi 90,28%. Namun pada tahun 2022 rasio meningkat cukup signifikan menjadi 94,76% dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 94,74%. Selanjutnya pada tahun 2024 rasio kembali meningkat menjadi 97,85%. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pusat.

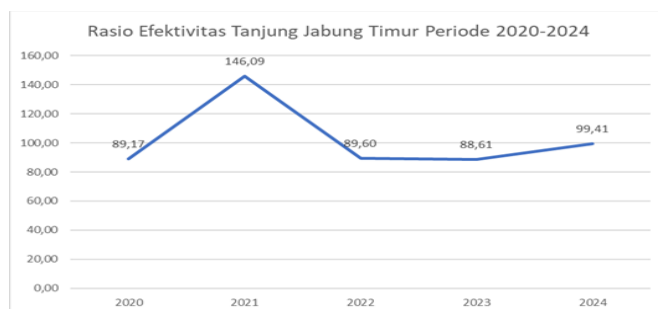
c. Rasio Desentralisasi Fiskal



Gambar 4 : Grafik Rasio Desentralisasi Fiskal

Berdasarkan grafik rasio desentralisasi fiskal, terlihat bahwa tingkat desentralisasi fiskal Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami fluktuasi selama periode 2020-2024. Pada tahun 2020 rasio tercatat sebesar 4,72 kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2021 menjadi 7,02. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 5,24 dan relatif stabil pada tahun 2023 sebesar 5,26, selanjutnya pada tahun 2024 rasio kembali meningkat menjadi 5,79.

d. Rasio Efektivitas



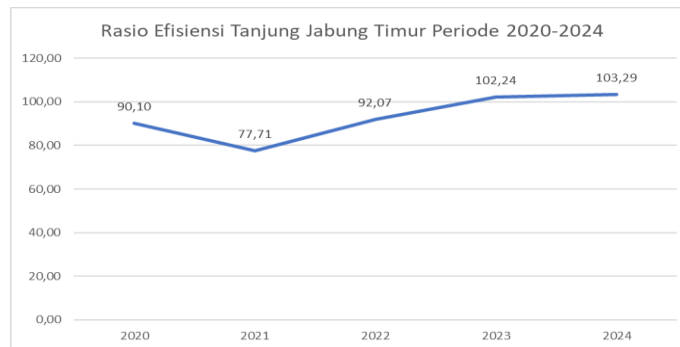
Gambar 5 : Grafik Rasio Efektivitas

Berdasarkan grafik rasio efektivitas Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 terlihat bahwa rasio efektivitas mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun

2020, rasio efektivitas sebesar 89,17% menunjukkan bahwa realisasi pendapatan belum sepenuhnya mencapai target yang ditetapkan.

Pada tahun 2021 terjadi peningkatan signifikan menjadi 146,09% yang berarti realisasi pendapatan jauh melampaui target dan menunjukkan kinerja yang sangat efektif. Namun, pada tahun 2022 rasio efektivitas menurun drastis menjadi 89,60% dan kembali mengalami sedikit penurunan pada tahun 2023 menjadi 88,61%. Pada tahun 2024, rasio efektivitas kembali meningkat menjadi 99,41% mendekati kategori efektif meskipun belum mencapai tingkat sangat efektif seperti tahun 2021.

e. **Rasio Efisiensi**

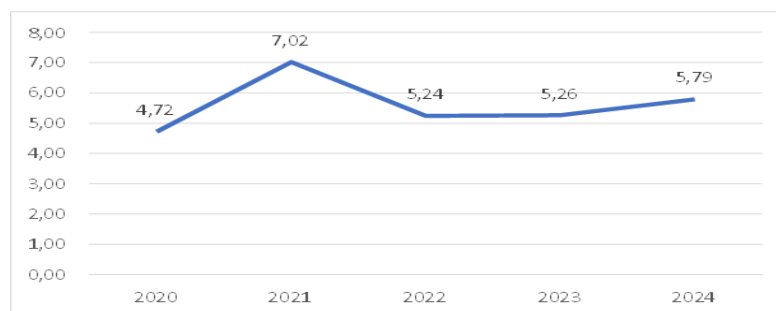


Gambar 6 : Grafik Rasio Efisiensi

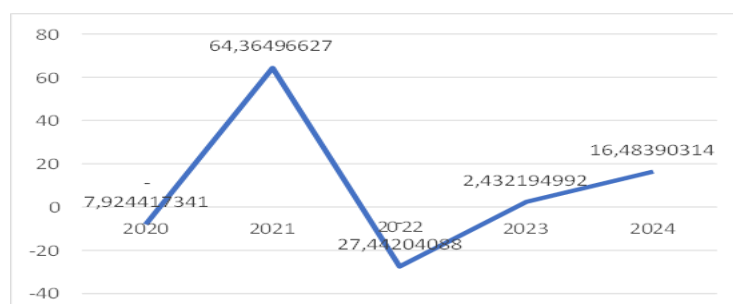
Berdasarkan hasil perhitungan rasio efisiensi Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode 2020-2024 diperoleh bahwa rasio efisiensi mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Pada tahun 2020 rasio efisiensi tercatat sebesar 90,10% yang menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah berada pada cukup efisien karena biaya yang dikeluarkan masih relatif besar dibandingkan realisasi pendapatan. Pada tahun 2021, rasio efisiensi menurun menjadi 77,71% yang mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi kinerja pemerintah daerah dalam mengelola pendapatan. Pada tahun 2022, rasio efisiensi kembali meningkat menjadi 92,07% menunjukkan penurunan tingkat efisiensi dibandingkan tahun sebelumnya. Kemudian pada tahun 2023 rasio efisiensi naik menjadi 102,24 dan pada tahun 2024 kembali meningkat 103,29.

Hasil Kemampuan Keuangan Daerah

a. **Share**



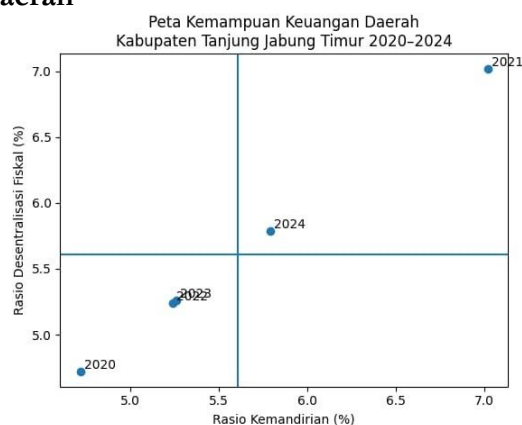
b. **Growth**



Gambar 7 : Grafik *Share* dan *Growth*

Grafik *share and growth* menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah masih bersifat fluktuatif. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan daerah masih rendah, sementara pertumbuhan PAD belum menunjukkan pola yang stabil. Oleh karena itu, diperlukan upaya optimalisasi sumber-sumber PAD agar kemandirian keuangan daerah dapat terus ditingkatkan.

Peta Kemampuan Keuangan Daerah



Gambar 7 : Peta Kemampuan Keuangan Daerah

Berdasarkan peta kemampuan keuangan daerah menggunakan nilai rata-rata sebagai garis pembagi, Kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada Kuadran III. Namun, berdasarkan kriteria rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal yang berada di bawah 10%, kemampuan keuangan daerah termasuk kategori sangat rendah dan ketergantungan tinggi terhadap pemerintah pusat.

Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

Tabel 1 : Indeks Kemampuan Keuangan Daerah

IKK	Tahun	$IKK = (NK + NE + NFS) / 3$	Klasifikasi
	2020	0.161521428	Rendah
	2021	0.666666667	Sedang
	2022	0.264932707	Rendah
	2023	0.394637529	Sedang
	2024	0.548373003	Sedang

Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK), daerah periode 2020-2024 kemampuan keuangan daerah berada pada kategori rendah hingga sedang yang mencerminkan adanya peningkatan kapasitas fiskal daerah, namun kemandirian keuangan daerah belum sepenuhnya optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaan otonomi daerah tahun 2020-2024 dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan daerah yang menunjukkan perkembangan yang cukup baik, meskipun tingkat kemandirian fiskal masih perlu ditingkatkan. Rasio kemandirian dan rasio desentralisasi fiskal masih berada pada kategori rendah yang menunjukkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah belum optimal. Tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat selama periode penelitian masih tergolong tinggi. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah masih didominasi oleh dana transfer pemerintah pusat.

Namun demikian, rasio efektivitas PAD menunjukkan kinerja yang relatif baik karena realisasi pendapatan daerah pada beberapa tahun mampu mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, meskipun masih terdapat fluktuasi dari tahun ke tahun. Berdasarkan hasil analisis kemampuan keuangan

daerah melalui pendekatan *share and growth*, peta kemampuan keuangan daerah serta Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) menunjukkan bahwa kemampuan keuangan kabupaten Tanjung Jabung Timur berada pada kategori rendah hingga sedang. Kondisi ini menunjukkan bahwa daerah memiliki potensi peningkatan kapasitas fiskal namun masih memerlukan upaya optimalisasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan kemandirian fiskal dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang ada, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur perlu meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, pengelolaan pajak dan retribusi, serta pemanfaatan aset daerah secara produktif. Selain itu, peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian belanja daerah serta pengembangan potensi ekonomi daerah secara berkelanjutan diperlukan untuk memperkuat struktur pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara optimal.

REFERENCES

- Alkadrie, R. K. (2023). *Baru Ringkasan Skripsi_Rafiz Kamili Alkadrie*. 1–11.
- Aminuddin, N. (2024). *Analisis Pengukuran Kinerja Keuangan dan Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah dalam Era Otonomi Daerah*. 32(3), 167–186.
- Jelvira Akmalia. (2020). Analisis Kinerja Keuangan, Kemampuan Keuangan Dan Evaluasi Anggaran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sijunjung. *OSF Preprints*, 1. <https://osf.io/preprints/te8r7/>
- Nabilah Denisa, & Dito Aditia Darma Nasution. (2025). Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah di Kabupaten Karo. *Jurnal Ekonomi, Manajemen Pariwisata Dan Perhotelan*, 4(2), 124–137. <https://doi.org/10.55606/jempper.v4i2.4033>
- Ningsih, S. A. (2023). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah. *Administrasi Publik*, 2(2), 236–243.